



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

PROVIDING SERVICES FOR GOOD GOVERNANCE

TAHUN

2026



<https://inspektorat.jambiprov.go.id/>

JL. LETJEND M.T. HARYONO NO 2
TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Melaksanakan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan semangat dan tekad yang kuat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan mewujudkan apa yang menjadi Tujuan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel Partisipatif* yang berorientasi pada Pelayanan Publik. Pada prinsipnya Rencana Kerja ini disusun dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai sarana panduan agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2025

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD 2021 - 2026	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026	8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026	15
2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan sebelumnya	21
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022.....	22
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023.....	30
2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	38
2.7 Permasalahan Yang Dihadapi.....	41
2.8 Hambatan dan Kendala.....	43
2.9 Upaya Pemecahan Masalah.....	43
2.10 Tantangan dan Peluang.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	47
3.2 Program dan Kegiatan.....	50
BAB IV PENUTUP	64

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dan 2024
- Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026
- Lampiran 3 Renja SIPD Tahun 2024 dan 2025

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra	8
Tabel 2.2	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra	15
Tabel 2.3	Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 -2016	21
Tabel 2.4	Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2023.....	22
Tabel 2.5	Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2024.....	30
Tabel 2.6	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	38
Tabel 2.7	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat 2021 s.d 2024	42
Tabel 2.8	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2016	46
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	48
Tabel 3.2	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	52
Tabel 3.3	Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah di 2026	54
Tabel 3.4	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026	57
Tabel 3.5	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Renja memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renja disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030, serta mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Penyusunan Renja ini juga merupakan bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil (*performance-based planning*), melalui proses identifikasi isu strategis, analisis capaian kinerja, serta perumusan program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran pembangunan daerah

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 telah bepedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyusun Renja Inspektorat dengan mempedomani RPJMD Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pasal 4 adalah Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat daerah..

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat daerah Provinsi Jambi perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program pengawasan dan konsulting harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah teilih dengan JMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
15. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
16. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

- Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :
- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional dan terukur.
 - b. Untuk Menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis;
 - b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2021-2026) dan prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2025-2029);
 - c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
 - d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : Evaluasi Renja OPD

1.1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Renja PD Tahun 2021 - 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra PD.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra PD

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan sebelumnya

Berisikan pencapaian realisasi kinerja PD pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2022.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2023

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan Strategi dan arah kebijakan PD yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional dan kepala daerah teilih.

2.7 Permasalahan Yang Dihadapi

Berisikan masalah-masalah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD di tahun 2024.

2.8 Hambatan dan Kendala

Berisikan masalah PD dalam mencapai target kinerja di tahun 2024.

2.9 Upaya Pemecahan Masalah

Berisikan strategi PD dalam mengambil kebijakan dimasa akan datang di tahun 2026.

2.10 Tantangan dan Peluang

Berisikan rencana yang diambil OPD dimasa akan datang di tahun 2026.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD yang diselaraskan dengan program nasional dan kepala daerah terpilih.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI RENJA PD TAHUN 2023 DAN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD 2021-2026

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA 2023	TARGET KINERJA 2023 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2023	Ket
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
I	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90,50%	54,96%	60,72	Tidak Tercapai
		2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Tercapai
		3	Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan asset.	65,12%	65%	108,53	Tercapai
		4	Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal “B”	100%	97%	100	Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Level 3	100	Tercapai
		2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	4,18	3	139,33	Tercapai
		3	Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	20%	20%	100	Tercapai

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

1) Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti

Realisasi atas indikator kinerja dengan Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 61,03%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 90,50%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjuti.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2023 terhadap pemenuhan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.
2. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut secara berkelanjutan dengan PD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
3. Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

Upaya meningkatkan hasil Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

2) Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 (terdefinisi), telah mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan pada OPD Provinsi Jambi khususnya 10 sampel OPD telah membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2023 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPIP di OPD.
2. Melaksanakan rapat koordinasi SPIP secara berkala dan berkelanjutan dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Memberikan bimbingan dan asistensi pengelolaan SPIP dan Penilaian Mandiri (PM) SPIP kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi.

Upaya meningkatkan hasil Tingkat Maturitas SPIP dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

3) Indikator Kinerja Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan asset sebesar 80% %,dari target 65% telah mencapai target yang diinginkan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dari penyimpangan material.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

Upaya meningkatkan hasil Indikator Kinerja Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

4) Indikator Kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B”.

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B” sebesar 100 % dari target 97%, belum mencapai target yang diinginkan

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal PD secara berkala.

- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP Perangkat Daerah.
- Melakukan pendampingan lanjutan kepada PD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- Memberikan saran kepada masing-masing PD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan

Upaya meningkatkan hasil Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B" dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

5) Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP level 3 dari target level 3, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh APIP sehingga menjadi apartur yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta menyusun rencana aksi.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6) Indikator Kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah

Realisasi atas Indikator kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dengan indeks 4,18 dari target indeks 3, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh PD untuk konsultasi tentang Masalah dan Kasus per Kasus yang sedang dihadapi masing-masing PD.
- Meningkatkan kemandirian APIP dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

7) Indikator Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi sebesar 20% dari target indeks 20%, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama tahun 2022.
- Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Menyediakan anggaran khusus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Dearah Provinsi Jambi.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD 2021-2026

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2024 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2024 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2024	Ket
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
I	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	85,54%	70 %	122,2	Tercapai
		2	Persentase tindak lanjut temuan BPK RI	71,02%	71%	100,03	Tercapai
		3	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Level 3	100	Tercapai
		2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	88,54	84,50	104,78	Tercapai
		3	Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	28,21%	25%	112,84	Tercapai

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

1) Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti

Realisasi atas indikator kinerja dengan Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat adalah 85,54%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 70%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang ada sudah ditindaklanjuti oleh PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut temuan Inspektorat.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2024 terhadap pemenuhan tindak lanjut temuan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut temuan dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.
2. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut temuan secara berkelanjutan dengan PD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
3. Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut temuan kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut temuan serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut temuan.

Upaya meningkatkan hasil Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

2) Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut temuan BPK RI

Realisasi atas indikator kinerja dengan Persentase Tindak Lanjut BPK RI adalah 71,02%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 71%. Hal tersebut karena rekomendasi temuan telah ditindaklanjuti oleh PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjuti.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2024 terhadap pemenuhan tindak lanjut temuan BPK RI adalah sebagai berikut :

1. Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

2. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut secara berkelanjutan dengan PD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
 3. Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.
- Upaya meningkatkan hasil Persentase tindak lanjut temuan BPK RI dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

3) Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 (terdefinisi), telah mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan pada Perangkat Daerah Provinsi Jambi khusus nya 10 sample Perangkat Daerah telah membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2024 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPIP di OPD
- b) Melaksanakan rapat koordinasi SPIP secara berkala dan berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- c) Memberikan bimbingan dan asistensi pengelolaan SPIP dan Penilaian Mandiri (PM) SPIP kepada Perangkat Daerah atau Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- d) Membuka kesempatan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk konsultasi

Upaya meningkatkan hasil Tingkat Maturitas SPIP dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

4) Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi

Realisasi atas Indikator Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi sebesar Level 3 dari target Level 3, telah mencapai target yang diinginkan Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
- Memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh APIP sehingga menjadi apartur yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta menyusun rencana aksi.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5) Indikator Kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah

Realisasi atas Indikator kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dengan indeks 88,54 dari target indeks 84,50, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh PD untuk konsultasi tentang Masalah dan Kasus per Kasus yang sedang dihadapi masing-masing PD.
- Meningkatkan kemampuan APIP dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6) Indikator Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi sebesar 28,21% dari target indeks 25%, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama tahun 2024.

- Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Menyediakan anggaran khusus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Dearah Provinsi Jambi.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan sebelumnya.

Tabel 2.3

Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 s.d 2026 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI								CAPAIAN HINGGA 31 DES 2024
			2021		2022		2023		2024		
			T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	89,35%	46,21%	90%	54,96%	90,50%	54,96%	70%	85,54%	85,54%
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71%	71,02%	71,02%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	N/A	3	4,14	3	4,18	84,50	88,54	88,54
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	10%	15%	15,27%	20%	20%	25%	28,21%	28,21%

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023

Tabel 2.4 Evaluasi Renja Inspektorat daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	BB Indeks	29.863.463.541	BB Indeks	10.844.072.705	BB Indeks	28.940.755.793	BB Indeks	43,42%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	21 Dokumen	1.059.036.520	7 Dokumen	473.172.038	21 Dokumen	945.017.154	37 Dokumen	119,27%
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	4 Dokumen	389.794.168	2 Dokumen	168.476.220	4 Dokumen	349.403.883	33 Dokumen	106,29%
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	17 Dokumen	669.242.352	5 Dokumen	304.695.818	17 Dokumen	595.613.271	38 Dokumen	133,74%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	18.534.855.572	108,16 %	5.563.292.098	425,51 %	18.449.224.072	524,27 %	44,35%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	98 Orang	18.534.855.572	106 Orang	5.563.292.098	417 Orang	18.449.224.072	103 Orang	44,35%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.372.113.450	54,29%	1.059.170.980	115,71%	2.278.254.360	209,67 %	27,79 %
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
B	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	70 Orang	2.372.113.450	38 Orang	1.059.170.980	81 Orang	2.278.254.360	39 orang	30,50%
C	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
D	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.266.539.496	35,59 %	750.592.412	100,00 %	2.138.056.635	198,91 %	38,55%
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	35.087.545	3 Paket	14.100.353	12 Paket	32.736.918	40 Paket	41,73%
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantro yang	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	105.026.518	3 Paket	40.337.915	12 Paket	84.922.997	40 Paket	38,47%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
		disediakan									
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	28 Paket	159.430.000	7 Paket	54.447.750	28 Paket	88.277.060	37 Paket	25,53%
D	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	108.076.800	3 Paket	32.438.650	12 Paket	79.581.821	40 Paket	25,83%
E	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	7.927.920	3 Paket	3.000.000	36 paket	7.185.000	36 Paket	5,39%
F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	500 Laporan	1.850.990.713	186 Laporan	607.017.744	500 Laporan	2.921.301.992	154 Laporan	89,31%
G	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	-	0,00%	-	0	-	0	0
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	3.092.796.002	38,46%	2.069.651.992	69,23%	2.921.301.992	154,07%	89,31%
A	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	6 Unit	1.039.350.000	1 Unit	674.000.000	2 Unit	989.000.000	16,17 Unit	56,51%

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	7 Unit	2.053.446.002	4 Unit	1.395.651.992	7 Unit	1.932.301.992	77,41 Unit	112,45%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.150.430.901	25,00 %	383.291.795	100,00 %	902.283.489	192,31 %	38,41%
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Surat Menyurat yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	107.859.820	3 Laporan	50.601.500	12 Laporan	99.421.000	33,33 Laporan	47,68%
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	411.124.320	3 Laporan	144.092.291	12 Laporan	329.900.896	40 Laporan	40,91%
C	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	30.520.000	3 Laporan	9.942.800	12 Laporan	25.984.900	36,67 Laporan	54,99%
D	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	600.926.761	3 Laporan	178.655.204	12 Laporan	446.976.693	40 Laporan	35,35%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.387.691.600	69,76 %	544.901.390	100,00 %	1.306.618.091	194,41 %	35,41%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan dibayarkan Pajaknya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	10 unit	289.580.000	6 unit	156.085.197	10 unit	287.299.696	28,57 unit	68,33%
B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/Lapan gan yang terpelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	21 unit	223.830.000	11 unit	112.315.265	21 unit	218.185.391	35,71 unit	25,68%
C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	170 unit	189.568.000	215 unit	97.986.928	170 unit	118.723.042	35,88 unit	23,80%
D	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabili tasi	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	4 unit	684.713.600	1 unit	178.514.000	4 unit	682.409.962	57,14 unit	35,30%
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan sesuai PKPT	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	74 %	12.112.806.712	90,83 %	6.040.724.660	200,00 %	10.699.805.837	333,89 %	37,99%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	74 %	9.837.165.372	47,98 %	4.844.192.241	100,00 %	8.460.002.329	208,18 %	34,84%
A	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	54 Laporan	2.974.580.267	33 Laporan	2.079.239.518	54 Laporan	2.723.870.317	37,50 Laporan	43,50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
		Daerah									
B	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	40 Laporan	3.916.497.825	18 Laporan	1.597.774.659	40 Laporan	3.227.466.931	38,31 Laporan	64,84%
C	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	21 Laporan	250.337.400	10 Laporan	108.164.500	21 Laporan	209.303.092	38,53 Laporan	52,11%
D	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	55 Laporan	711.623.100	36 Laporan	369.274.200	55 Laporan	459.798.821	39,43 Laporan	66,86%
E	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	21 Laporan	927.703.580	8 Laporan	309.528.024	21 Laporan	827.375.101	37,38 Laporan	15,95%
F	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	155 Dokumen	1.056.423.200	61 Dokumen	380.211.340	155 Dokumen	1.012.188.067	36,39 Dokumen	23,55%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	74 %	2.275.641.340	42,86 %	1.196.532.419	100 %	2.239.803.508	197,19 %	60,59%

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
A	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian tuntutan kerugian negara/daerah yang ditangani	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	2 Laporan	406.971.210	1 Laporan	266.795.575	2 Laporan	402.846.992	40,00 Laporan	136,24%
B	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	13 Laporan	1.868.670.130	8 Laporan	929.736.844	19 Laporan	1.836.956.516	38,95 Laporan	54,59%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks Reformasi Birokrasi Katagori "B"	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 %	2.514.049.680	34,56 %	1.255.381.810	174,26 %	2.028.012.465	350,76 %	27,56%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Rekomendasi	85.040.600	0,00 %	-	100 %	70.070.238	244,44 Rekomendasi	3,11%
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Rekomendasi	85.040.600	-	-	7 Rekomendasi	70.070.238	37,78 Rekomendasi	3,11%
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 %	2.429.009.080	34,56 %	1.255.381.810	74,26 %	1.957.942.227	170,03 %	32,92%
A	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 OPD	187.730.000	10 Perangkat Daerah	54.033.480	33 Perangkat Daerah	154.144.511	35,35 Perangkat Daerah	13,38%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023(%)	
B	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 OPD	128.411.060	18 Perangkat Daerah	78.657.800	23 Perangkat Daerah	100.744.879	30,70 Perangkat Daerah	26,52%
C	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	46 Kegiatan	1.888.382.960	16 Kegiatan	1.011.088.388	41 Kegiatan	1.565.667.745	35,71 Kegiatan	53,26%
D	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	4 OPD	224.485.060	3 Perangkat Daerah	111.602.142	4 Perangkat Daerah	137.385.092	25,81 Perangkat Daerah	7,68%
								Persentase Serapan Anggaran per Desember 2023		93,66%	
Predikat Kinerja											

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Tabel 2.5 Evaluasi Renja Inspektorat daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	BB Indeks	29.394.987.940	BB Indeks	9.283.915.360	BB Indeks	27.041.177.005	BB Indeks	91,99%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	21 Dokumen	714.110.920	5 Dokumen	382.271.100	21 Dokumen	841.221.900	100	117,8
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	4 Dokumen	199.794.168	1 Dokumen	38.789.000	4 Dokumen	196.751.260	100	98,48
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	17 Dokumen	514.316.752	4 Dokumen	343.482.100	17 Dokumen	644.470.640	100	125,31
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	20.061.211.533	100 %	6.559.777.644	100 %	21.023.669.970	100%	104,8%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	98 Orang	20.061.211.533	107 Orang	6.559.777.644	107 Orang	21.023.669.970	107 Orang	104,8%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.537.849.075	100%	269.264.320	115,71%	1.253.193.698	100%	49,38 %
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
B	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	75 Orang	2.537.849.075	31 Orang	269.264.320	31 Orang	1.253.193.698	41 orang	49,38 %
C	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
D	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.756.114.298	93,75 %	656.330.888	93,75 %	1.695.435.139	93,75 %	96,54%
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	32.449.318	3 Paket	21.425.240	3 Paket	31.813.780	25	98,04

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
		yang Disediakan									
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantro yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	99.995.100	3 Paket	56.932.530	12 Paket	98.912.560	100	98,92
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	28 Paket	151.020.000	7 Paket	47.884.580	28 Paket	59.022.580	100	39,08
D	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	127.600.250	3 Paket	42.845.020	6 Paket	104.607.020	50	81,98
E	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Paket	29.062.837	3 Paket	1.500.000	6 paket	2.250.000	50	7,74
F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	500 Laporan	1.315.986.793	125 Laporan	485.743.518	500 Laporan	1.398.829.199	100	106,3
G	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	-	0,00%	-	0	-	0	0
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.359.946.830						

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
A	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0 Unit	-						
B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	8 Unit	1.359.946.830						
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.198.296.084	100 %	538.210.518	100,00 %	990.724.124	100,00 %	82,68%
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Surat Menyurat yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	101.975.520	3 Laporan	46.816.500	12 Laporan	95.353.000	100	93,51
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	372.545.000	3 Laporan	236.710.486	12 Laporan	369.239.010	100	99,11
C	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	49.737.500	3 Laporan	15.699.550	12 Laporan	29.581.850	100	59,48
D	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	12 Laporan	674.038.064	3 Laporan	238.983.982	12 Laporan	496.550.264	100	73,67
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terperlihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.767.459.200	100 %	878.060.890	100,00 %	1.236.932.174	100 %	69,98%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
	Daerah										
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan dibayarkan Pajaknya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	13 unit	283.270.000	3 unit	141.692.389	12 unit	262.983.538	92,31	92,84
B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/Lapan gan yang terpelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	24 unit	325.490.000	6 unit	123.461.300	243 unit	225.539.442	100	69,29
C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	170 unit	177.990.000	42 unit		170 unit	38.298.843	100	21,52
D	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabi litasi	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	2 unit	980.709.200	1 unit	612.907.201	2 unit	710.110.351	100	72,41
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan sesuai PKPT	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	76 %	5.226.553.042	94,12 %	2.034.385.020	94,12 %	5.664.653.864	123,84%	108,38%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	76 %	3.998.843.420	88,24 %	1.606.919.400	88,24 %	4.386.285.157	116,11 %	109,69%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
A	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	56 Laporan	753.664.000	14 Laporan	454.732.600	56 Laporan	1.125.525.817	100	149,34
B	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	40 Laporan	944.075.000	10 Laporan	444.690.800	40 Laporan	1.082.380.893	100	114,65
C	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	21 Laporan	129.278.000	5 Laporan	103.257.100	11 Laporan	172.368.150	52,38	133,33
D	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	55 Laporan	520.598.060	13 Laporan	361.082.200	55 Laporan	575.967.375	100	110,64
E	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	21 Laporan	840.796.160	5 Laporan	22.173.400	11 Laporan	672.985.605	52,38	80,04
F	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	155 Dokumen	810.432.200	38 Dokumen	220.983.300	155 Dokumen	757.057.317	100	93,41
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100 %	1.227.709.622	100 %	427.465.620	100 %	1.278.368.707	100 %	104,13%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
A	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian tuntutan kerugian negara/daerah yang ditangani	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	2 Laporan	166.971.210	1 Laporan	44.467.060	2 Laporan	131.170.465		78,56
B	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	19 Laporan	1.060.738.412	4 Laporan	382.998.560	19 Laporan	1.147.198.242	100	108,15
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks Reformasi Birokrasi Katagori "B"	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	48 %	2.026.107.595	35,35 %	836.848.594	35,35 %	1.766.537.481	73,65 %	87,19%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Rekomend asi	141.511.160	1	102.965.000	5 Rekomend asi	115.806.580	71,43	81,84%
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Rekomend asi	141.511.160	1	102.965.000	5 Rekomend asi	115.806.580	71,43	81,84%
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100 %	1.884.596.435	69,7 %	733.883.594	69,7 %	1.650.730.901	69,7 %	87,59%
A	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 OPD	234.620.000	10 Perangkat Daerah	41.000.000	43 Perangkat Daerah	201.467.057	100	85,87

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024(%)	
B	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 OPD	162.031.060	10 Perangkat Daerah	34.919.900	20 Perangkat Daerah	125.076.900	46,51	77,19
C	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	46 Kegiatan	1.288.940.315	11 Kegiatan	532.353.244	46 Kegiatan	1.147.766.414	100	89,05
D	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	4 OPD	199.005.060	2 Perangkat Daerah	125.610.450	6 Perangkat Daerah	176.420.530	100	88,65
								Persentase Serapan Anggaran per Desember 2024		94,06%	
Predikat Kinerja											

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak teisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Table 2.6
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, (MANTAP)				
MISI : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan				
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
		Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; c. Survei Prespektif Corruption.
			Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah; b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah.
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas; c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja.
			Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>
			Peningkatan mutu pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan
			Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun peta kompetensi SDM b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 - 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.7 Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat belum terwujudnya visi, misi dan tujuan daerah apabila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kebelakang serta tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum tepat waktu

Tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah) dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Dengan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan berarti pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan”. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan “Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat” dan pada pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa “Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditegaskan dalam pasal 18 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pejabat pengawas

pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan belum tepat waktu disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian /komitmen dari pimpinan unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, perbedaan persepsi tentang hasil pengawasan dari pimpinan perangkat daerah hingga belum adanya sanksi yang tegas terhadap penegakan sanksi terhadap hasil rekomendasi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian hasil tindak lanjut Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dari Tahun 2021 s.d 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Temuan Inspektorat 2021-s.d 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	89,35%	90,00%	90,50%	70,00%	46,21%	50,93%	54,96%	85,54%	48,14%	49,62%	60,72%	122,2%

Sumber data: LKjIP Inspektorat (data diolah)

2. Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP

Sumber Daya Manusia pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengawasan. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum memadai dari segi kuantitas dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks dan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sehingga diperlukan APIP yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Berdasarkan surat Kepala BPKP Nomor S-621/K/JF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan surat

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.2.1/3492/IJ tanggal 21 Desember 2022 jumlah yang dibutuhkan/direkomendasikan untuk Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dan Pejabat Fungsional PPUPD sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang. Saat ini terdapat Pejabat Fungsional Auditor 28 (dua puluh delapan) orang dan Pejabat Fungsional PPUPD 51 (lima puluh satu) orang dengan jumlah objek pemeriksaan sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit kerja dan 11 (sebelas) kabupaten/kota, sehingga terdapat keterbatasan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik itu pengawasan atas kinerja seluruh Perangkat Daerah maupun untuk menangani kasus-kasus pengaduan dari Pemerintah dan Gubernur. Demikian juga standar kompetensi profesional SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi dan merata. Masih kurangnya APIP yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

3. Penerapan Manajemen Risiko belum berlangsung efektif, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah.

2.8 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 antara lain masih terbatasnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, kompeten dan berintegritas sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan belum maksimal baik secara intern di dalam lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan ektern di dalam lingkup Inspektorat dengan SKPD, Obrik, dan Masyarakat.

2.9 Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga terjadi peningkatan intensitas pengawasan OPD di Lingkup Provinsi Jambi;

2. Melakukan Assistensi dan Pendampingan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan cara Mendorong SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
3. Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Memfasilitasi SKPD dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional secara berkala dalam Mendorong SKPD agar segera menyelesaikan rekomendasi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional;
5. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya sehingga tercapai Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas.

2.10 Tantangan dan Peluang

1. Tantangan (*challenge*)

1) Penerapan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi

Pelaksanaan pengawasan saat ini belum berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan pengawasan masih dilakukan secara manual dengan meminta *hardcopy* pada auditi serta pengumpulan dan penataan Data Base Pengawasan dilakukan secara manual.

Dalam rangka melaksanakan Misi Gubernur Jambi untuk Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan harus didukung dengan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi.

2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya kebaikan tatakelola pemerintahan. Tatakelola pemerintah yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan sangat mempengaruhi

pelaksanaan program-program pembangunan semakin baik tatakelola pemerintahan suatu daerah semakin cepat pula pembangunan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga terwujudnya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, bersih, dan melayani.

3) Meningkatkan Sinergitas APIP dengan APH

Dalam melakukan koordinasi penanganan laporan dan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan peningkatan Sinergitas Kerjasama antara APIP dan APH.

4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Memastikan APIP memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP yang kompeten dan profesional.

2. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Terdapatnya peraturan perundangan-undangan tentang:
 - Perencanaan pengawasan
 - Reformasi birokrasi
- 2) MOU Sinergitas kerjasama APIP dan APH
- 3) Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan APIP yang profesional
- 4) Adanya komitmen yang tinggi dari Gubernur tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun perencanaan pembinaan dan pengawasan pada Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi selama 10 tahun dari tahun 2016 s/d 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2026

No.	OBRIK	TAHUN											JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	SKPD	45	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	475
2.	KASUS	21	34	34	16	16	16	16	16	16	16	16	217
3.	KAB/KOTA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	121
JUMLAH		77	88	88	70	70	70	70	70	70	70	70	813

Sedangkan untuk tahun 2026 direncanakan pembinaan dan pengawasan pada lingkup Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 70 obrik binaan pengawasan, yaitu :

- a) 43 SKPD
- b) 11 Kasus
- c) 11 Kabupaten/Kota

BAB 3

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja yang disingkat Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun untuk satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimana untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2024 disusun masih mengacu pada JMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Untuk mendukung misi Gubernur Jambi “memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung oleh e-government yang terintegrasi”, dengan tujuan “mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan pelayanan publik berkualitas”. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya maka tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah “mewujudkan tata kelola Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.”

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	89,35%	90,00%	90,50%	70,00%	46,21%	50,93%	54,96%	85,54%	48,14%	49,62%	60,72%	122,2%
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK	NA	NA	NA	71,00%	NA	NA	NA	71,02%	NA	NA	NA	100,03%
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	70%	95%	97%	-	93,02%	88,37%	97%	-	132%	93,72%	100%	-
6	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	3	3	84,50%	N/A	4,14	4,18	88,54%	N/A	138%	139,33%	104,78%
7	Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	15%	20%	25%	-	15,27%	20%	28,21%	-	101%	100%	112,21%

Sumber data: LKj Inspektorat (data diolah)

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi periode 2021–2024, indikator persentase tindak lanjut temuan Inspektorat menunjukkan tren peningkatan dari 48,14% pada tahun 2021 hingga mencapai 122,2% pada tahun 2024. Indikator tindak lanjut temuan BPK baru diukur pada tahun 2024 dengan capaian 100,03%. Indikator tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP konsisten berada pada level 3 dengan capaian 100% sepanjang periode 2021–2024. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai “B” relatif tinggi, bahkan melampaui target pada tahun 2021 (132%) dan tahun 2023 (100%), meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 (93,72%). Indeks kepuasan auditi atas layanan pembinaan dan pengawasan Inspektorat juga menunjukkan hasil yang sangat baik, mencapai 139,33% pada tahun 2023. Sementara itu, persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi terus meningkat hingga 28,21% pada tahun 2024, melampaui target tahunan yang ditetapkan.

Analisis Diagnostik (Sebab-Akibat)

Peningkatan capaian tindak lanjut temuan Inspektorat dipengaruhi oleh semakin kuatnya koordinasi lintas SKPD, meskipun capaian yang rendah pada awal periode disebabkan keterbatasan mekanisme pemantauan dan rendahnya kesadaran auditi. Indikator tindak lanjut temuan BPK dapat tercapai karena adanya dorongan kuat dari mekanisme pengawasan eksternal. Stagnasi tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP pada level 3 menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kompetensi SDM. Fluktuasi capaian SAKIP mencerminkan variasi kualitas manajemen kinerja antarperangkat daerah, yang sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan masing-masing. Tingginya kepuasan auditi menunjukkan peningkatan kualitas layanan pengawasan, namun masih terdapat kesenjangan antara kualitas pembinaan dengan efektivitas pengendalian atas temuan. Peningkatan jumlah APIP bersertifikat kompetensi dipengaruhi oleh kebijakan sertifikasi profesi, meskipun keberlanjutannya bergantung pada dukungan anggaran dan penyelenggaraan program pendidikan serta pelatihan.

3.2 Program dan Kegiatan

Secara garis besar program yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 2 (dua) program dan 1 (satu) program penunjang yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi direncanakan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- d. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- e. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi direncanakan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi direncanakan dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendukung Program Pembangunan Daerah, disajikan pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpanan baik yang bersifat anggaran ataupun proses kewenangan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Reviu Pelaporan Kinerja	
			Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	

			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

Tabel 3.3

Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah di 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat	80%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI	75%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Temuan BPK RI	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan BPK RI	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Perspektif Corruption	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Peningkatan Kualitas	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Program Penyelenggaraan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early	a. Assurance Activities b. Consulting/Advisory Activities c. Anti Corruption Activities	Program Penunjang Urusan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembagunan Daerah
	yang berkualitas			Warning System kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		Pemerintah Daerah
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	86	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	35 %	Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun profil kompetensi SDM b. Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.4
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2025	
					Target	Rp
URUSAN PENGAWASAN						46.214.106.449
Program Penyelenggaraan Pengawasan			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT		78%	7.189.178.460,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal		78%	5.695.193.850,00
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	58 Lap	1.721.005.600,00
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2)	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Lap	1.846.309.900,00
	3)	Reviu Laporan Kinerja	3)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	23 Lap	50.275.600,00
	4)	Reviu Laporan Keuangan	4)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	57 Lap	38.900.900,00
	5)	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	5)	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	22 Lap	1.014.192.050,00
	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155 Dok	1.024.509.800,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	1.493.984.610,00
	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1)	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	172.131.210,00
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2)	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 Lap	1.321.853.400,00
Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi			Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan		53%	2.168.745.085,00
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan		7	284.162.650,00
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	284.162.650,00

2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi		100%	1.884.582.435,00
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 PD	234.620.000,00
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 PD	162.017.060,00
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Keg	1.288.940.315,00
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 PD	199.005.060,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Predikat AKIP		B	36.856.182.904,00
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan		23 Dok	1.389.256.816,00
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	374.940.064,00
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	2)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	1.014.316.752,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	22.050.963.088,00
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang	22.050.963.088,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	3.087.840.717,00
	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	2.677.010.092,00
	2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	250 Orang	410.830.625,00
	3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	NA	0,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	2.152.318.299,00

	1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	33.799.319,00
	2)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.393.100,00
	3)	Penyediaan barang logistik kantor	3)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	0,00
	4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	132.400.250,00
	5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Paket	29.062.837,00
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	1.766.662793,00
	7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	100.000.000,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100%	4.532.123.700,00
	1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3.052.563.000,00
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2)	Pengadaan sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	83 Unit	1.479.560.700,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	1.216.741.084,00
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	101.975.520,00
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	424.500.000,00
	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	49.737.500,00
	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	640.528.064,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teelihara		100%	2.426.939.200,00
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	283.270.000,00

	2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	570.890.000,00
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	177.990.000,00
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.394.789.200,00

Tabel 3.5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif
Yang Ditetapkan Rp.42.420.856.151,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2026	
					Target	Rp
URUSAN PENGAWASAN						42.420.856.151
Program Penyelenggaraan Pengawasan			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT		78%	6.485.558.070,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal		78%	5.283.831.160,00
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	58 Lap	1.791.407.600,00
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2)	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Lap	1.630.237.836,00
	3)	Reviu Laporan Kinerja	3)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	23 Lap	22.983.100,00
	4)	Reviu Laporan Keuangan	4)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	57 Lap	24.487.200,00
	5)	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	5)	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	22 Lap	841.744.500,00
	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155 Dok	972.970.924,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	1.201.726.910,00

	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1)	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	137.732.260,00
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2)	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 Lap	1.063.994.650,00
Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi			Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan		53%	1.417.858.499,00
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan		7	319.114.150,00
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	319.114.150,00
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi		100%	1.098.744.349,00
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	43 PD	172.292.000,00
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 PD	160.098.675,00
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Keg	580.802.674,00
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 PD	185.551.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Predikat AKIP		B	34.517.439.582,00
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan		23 Dok	1.554.456.500,00
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	290.788.000,00
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	2)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	1.050.000.000,00
	3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		213.668.500,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	23.721.375.099,00

	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang	23.346.135.099,00
	2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2)			375.240.000,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	2.297.686.712,00
	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	2.083.699.312,00
	2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	250 Orang	213.987.400,00
	3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	NA	0,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	1.569.376.518,00
	1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	33.581.890,00
	2)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.208.100,00
	3)	Penyediaan barang logistik kantor	3)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	0,00
	4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	132.400.250,00
	5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	1.621.485 ,00
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	1.224.366.793,00
	7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	87.198.000,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100%	1.005.980.000,00
	1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	1)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	0,00
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2)	Pengadaan sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	NA	1.005.980.000,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	1.520.295.593,00

	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	100.327.260,00
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	394.204.723,00
	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	21.485.000,00
	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	1.004.278.610,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teelihara		100%	2.848.269.160,00
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	283.270.000,00
	2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	495.930.000,00
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	177.990.000,00
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.891.079.160,00

BAB 4

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun mendatang.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini dapat menjadi acuan sementara dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya, baik yang tertuang dalam RKA-KL dan DPA OPD berdasarkan pagu indikatif 2026.

Jambi, Januari 2025



H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

L A M P I R A N

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah Inspektarat Daerah Provinsi Jambi
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi vane mengacu pada sasaran RKPD Provinsi

No	Sasaran	Kode	Program/Regiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kejelasan (output)	Target Renstra PD Provinsi pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Provinsi sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Provinsi yang diusulkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Provinsi yang diusulkan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Provinsi s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Provinsi s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	Menyempatkan waktu penemuan yang inovatif		PROBES PEMUKAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berkas ANP	88	127.831.989.425,76	88	26.475.595.535	88	29.863.463.561	88	4.914.645.176	88	6.893.776.741	88	6.721.263.169	88	15.844.072.705	A	26.940.765.793	A	55.416.361.716	88	43,42%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun dan Disetujui	100	Dok 1.711.749.980,54	20	Dok 1.098.874.111	21	Dok 1.099.036.020	4	Dok 215.448.823	4	Dok 163.473.300	5	Dok 82.824.963	7	Dok 475.172.038	21	Dok 845.017.154	41	Dok 2.041.031.285	27,61	Dok 119,27%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pemantauan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disetujui	24	Dok 922.270.119,96	4	Dok 629.079.883	4	Dok 386.794.166	0	Dok 96.537.707	0	Dok 73.559.400	2	Dok 10.800.586	2	Dok 169.476.220	4	Dok 343.403.893	8	Dok 899.862.766	32,33	Dok 106,28%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Koordinasi dan Pengaturan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja yang Disetujui	85	Dok 809.479.840,59	16	Dok 436.986.228	17	Dok 583.242.382	4	Dok 116.908.116	4	Dok 89.913.800	4	Dok 82.084.437	6	Dok 304.695.916	17	Dok 595.613.271	33	Dok 1.062.808.498	36,82	Dok 153,74%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Saldo dan Tunjangan Asst	100	% 82.323.881.514,78	88,76	% 16.085.082.548	100	% 16.834.885.972	103,08	% 3.856.976.263	107,14	% 4.762.440.842	107,14	% 4.614.514.868	108,16	% 5.063.292.008	405,81	% 16.465.234.475	106	824,27	% 36.814.306.821	524,27	% 44,36%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asst	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asst	800	Orang 82.323.881.514,78	38	Orang 16.085.082.548	39	Orang 16.834.885.972	101	Orang 3.856.976.263	105	Orang 4.762.440.842	105	Orang 4.614.514.868	106	Orang 5.063.292.008	417	Orang 16.465.234.475	104	516	Orang 36.814.306.821	103,00	Orang 44,36%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Pagu yang Jumlah Realisasi dan Pagu	100	% 17.489.823.160,00	83,96	% 2.684.360.593	100	% 2.372.113.459	3,14	% 68.896.740	14,39	% 348.077.234	40,00	% 901.149.426	54,39	% 1.095.170.980	116,71	% 2.278.254.360	309,67	% 4.882.620.848	209,67	% 27,76%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Pakaian Dinas Berasta untuk dan keluarganya	Jumlah Pakaian Dinas Berasta Alotul Dikembangkan	420	Bal 338.000.000,00	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	Bal -	-	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	370	Orang 15.943.823.160,00	88	Orang 2.684.366.988	70	Orang 2.372.113.459	6	Orang 68.896.740	10	Orang 348.077.234	26	Orang 901.149.426	36	Orang 1.095.170.980	61	Orang 2.278.254.360	146	Orang 4.882.620.848	39,46	Orang 30,80%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Salahsatu Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	1000	Orang 610.000.000,00	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	-
			Salahsatu Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	1000	Orang 610.000.000,00	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	Orang -	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Berkas dan Dokumen	100	% 10.983.896.798,18	85,81	% 2.085.191.387	888	% 2.388.026.486	15,37	% 425.495.245	16,82	% 419.007.986	38,82	% 543.981.380	39,59	% 750.992.410	100,00	% 2.139.096.636	180,31	% 4.223.247.902	180,31	% 38,88%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Kebutuhan Material Lahan/Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Perakitan Lahan/Perencanaan Bangunan Kantor yang Dikembangkan	60	Paket 162.447.207,23	12	Paket 36.048.388	12	Paket 36.087.646	3	Paket 9.336.180	3	Paket 9.336.180	3	Paket 9.336.180	3	Paket 14.100.363	12	Paket 32.796.918	24	Paket 67.766.310	40,00	Paket 41,72%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Dikembangkan	60	Paket 451.787.806,42	12	Paket 89.846.737	12	Paket 106.028.516	3	Paket 22.280.255	3	Paket 22.304.827	3	Paket 22.304.827	3	Paket 40.337.815	12	Paket 84.922.367	24	Paket 173.766.734	40,00	Paket 39,47%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dikembangkan	144	Paket 862.086.954,73	28	Paket 127.306.633	28	Paket 169.430.000	7	Paket 16.864.700	7	Paket 14.174.510	7	Paket -	7	Paket 34.447.760	28	Paket 89.277.080	64	Paket 225.483.693	37,50	Paket 25,83%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Barang Cetak dan Pengembangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengembangan yang Dikembangkan	60	Paket 630.507.193,61	12	Paket 84.967.744	12	Paket 106.076.800	3	Paket 25.008.455	3	Paket 750.000	3	Paket 17.384.716	3	Paket 32.436.650	12	Paket 79.991.821	24	Paket 164.430.665	40,00	Paket 25,83%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Bahan Baku dan Perengkapan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Baku dan Perengkapan Kantor yang Dikembangkan	60	Paket 132.386.125,21	10	Paket 4.140.000	12	Paket 7.827.800	3	Paket -	3	Paket 750.000	3	Paket -	3	Paket 2.260.000	12	Paket 3.000.000	22	Paket 7.140.000	36,87	Paket 5,89%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	2000	Lap 7.414.976.476,13	496	Lap 1.795.081.688	800	Lap 1.980.980.713	73	Lap 345.215.688	84	Lap 402.323.976	147	Lap 484.871.434	166	Lap 607.817.744	800	Lap 1.649.537.838	889	Lap 3.684.629.697	39,92	Lap 49,34%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah Paket Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	6	Dok 1.272.728.843,76	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	Dok -	-	-
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Revisi dan Revisi	100	% 4.230.000.000,00	84,84	% 950.290.889	100	% 3.082.796.023	0,00	% -	80,77	% 601.800.000	0,00	% -	38,46	% 2.069.881.982	69,23	% 2.921.301.882	154,07	% 3.777.682.880	154,07	% 69,31%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Unit Hewan Dinas Operasional atau Layanan yang Dikembangkan	12	Unit 1.750.000.000,00	0	Unit -	6	Unit 1.038.390.000	0	Unit -	1	Unit 315.000.000	0	Unit -	1	Unit 674.000.000	3	Unit 989.000.000	2	Unit 989.000.000	16,67	Unit 56,61%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalam Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Dalam Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikembangkan	238	Unit 2.480.000.000,00	178	Unit 896.390.889	7	Unit 2.063.446.002	0	Unit -	3	Unit 536.600.000	0	Unit -	4	Unit 1.395.651.982	7	Unit 1.822.301.982	186	Unit 2.799.682.980	77,41	Unit 112,49%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Penyung Operasi Pemerintahan Daerah	Perentase Pemenuhan Jasa Penyung Kantor	100	% 4.430.385.195,42	82,21	% 769.471.891	100	% 1.100.400.911	38,05	% 234.376.067	25,00	% 167.639.606	25,00	% 116.576.001	25,00	% 363.281.795	100,00	% 802.269.446	192,31	% 1.701.765.367	192,31	% 38,41%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Sural Masyarakat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sural Masyarakat	80	Lap 336.971.680,07	8	Lap 60.763.372	12	Lap 107.893.620	3	Lap 24.782.000	3	Lap 18.244.000	3	Lap 7.763.000	3	Lap 60.601.800	12	Lap 89.431.000	20	Lap 160.164.372	33,33	Lap 47,68%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Komunikasi, Bantuan Daya Air dan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Bantuan Daya Air dan Lainnya	60	Lap 1.367.693.802,06	12	Lap 229.623.270	12	Lap 411.124.300	3	Lap 96.807.851	3	Lap 73.987.823	3	Lap 16.033.431	3	Lap 144.082.291	12	Lap 329.890.896	24	Lap 669.824.169	40,00	Lap 40,81%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Dikembangkan	60	Lap 82.892.810,08	10	Lap 26.100.000	12	Lap 30.820.000	3	Lap 9.846.800	3	Lap 3.699.200	3	Lap 2.488.400	3	Lap 9.843.800	12	Lap 25.864.800	22	Lap 61.064.800	36,67	Lap 54,89%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Lap 2.633.856.163,21	12	Lap 493.368.254	12	Lap 600.906.761	3	Lap 102.840.236	3	Lap 73.729.763	3	Lap 91.851.170	3	Lap 179.655.204	12	Lap 448.976.893	24	Lap 930.361.947	40,00	Lap 35,20%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Revisi dan Revisi	100	% 6.482.074.458,08	84,41	% 886.516.654	150	% 1.387.681.600	6,76	% 61.485.002	10,24	% 148.486.173	10,24	% 661.703.809	6,76	% 644.901.380	100,00	% 1.026.916.001	194,41	% 2.285.136.645	194,41	% 35,41%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Bantu Pemeliharaan dan Pagar Herdand Perengkapan Dinas atau Herdand Dinas Jabatan	Jumlah Herdand Pemeliharaan Dinas atau Herdand Dinas Jabatan yang Dikembangkan	66	Unit 787.886.653,89	6	Unit 261.108.070	10	Unit 289.880.000	0	Unit 24.306.859	0	Unit 29.081.769	4	Unit 77.826.171	6	Unit 156.086.187	10	Unit 267.289.896	16	Unit 638.408.766	26,87	Unit 69,39%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Bantu Pemeliharaan, Pagar dan Perengkapan Dinas atau Operasional atau Layanan	Jumlah Herdand Pemeliharaan Dinas atau Herdand Dinas Jabatan yang Dikembangkan	112	Unit 1.664.872.935,11	19	Unit 181.022.208	21	Unit 223.830.000	0	Unit 9.802.489	0	Unit 26.846.663	10	Unit 70.720.876	11	Unit 112.316.265	21	Unit 216.186.261	40	Unit 399.207.899	36,71	Unit 25,89%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pemeliharaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Dikembangkan	960	Unit 800.300.369,87	126	Unit 95.654.800	170	Unit 189.668.000	20	Unit 9.201.173	20	Unit 9.474.941	5	Unit 2.060.000	126	Unit 97.886.508	170	Unit 118.723.042	306	Unit 214.377.642	36,88	Unit 23,80%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikembangkan	14	Unit 9.398.911.662,00	4	Unit 460.792.776	4	Unit 684.713.600	0	Unit 19.184.800	1	Unit 84.684.800	2	Unit 401.128.362	1	Unit 176.614.000	4	Unit 682.409.862	8	Unit 1.142.142.738	87,14	Unit 35,20%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi	
2	Menyempatkan waktu penemuan yang inovatif		PROBES PEMUKAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berkas ANP	80	% 46.144.000.790,77	87,11	% 6.632.216.916	74	% 12.112.806.712	37,04	% 2.057.007.470	30,76	% 1.191.486.907	40,86	% 1.470.107.800	90,83	% 6.040.724.660	300,00	% 10.889.806.637	200	267,11	% 17.652.021.682	332,03	% 37,93%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi
			Pengelolaan Pengawasan Internal	Perentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	888	% 40.630.086.200,02	86,84	% 5.644.272.366	74	% 9.637.168.372	18,00	% 1.679.775.479	16,47	% 162.275.027	17,00	% 979.769.603	47,36	% 4.044.182.241	100,00	% 8.600.002.228	100	166,54	% 14.106.275.314	256,16	% 34,84%	Inspektoral Daerah Provinsi Jambi

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI JAMBI
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:				Target Realisasi	
1.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektoral			70	78,67
2.	Persentase tindak lanjut temuan BPK RI			71	78
3.	Nilai Capaian MCP IKK			0	
4.	Tingkat Mutu/ta SPP			3	3
5.	Tingkat Kapabilitas APSP			3	3
6.	Indeks kepuasan audi/ atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektoral Daerah			84,5	85
7.	Persentase APSP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi			25	25

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Rend Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang direalisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direalisasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17												
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan,akuntabel dan legal	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Person	80	46.144.000.791	90,83	76	5.226.593.042	94,12	646.223.723	94,12	1.824.725.998	94,12	1.157.319.123	94,12	2.034.385.020	94,12	5.664.683.864	123,84	106,38	92,475	5.664.683.864	115,59	12,28	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Person	80	40.490.096.200	90,83	76	3.999.843.420	88,24	596.526.123	88,24	1.240.361.765	88,24	942.477.889	88,24	1.606.919.400	88,24	4.386.285.157	116,11	109,69	89,535	4.386.285.157	111,92	10,83	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	280	9.313.918.391	54	56	753.664.000	14	122.588.157	14	469.245.560	14	78.959.500	14	454.732.600	56	1.125.525.817	100,00	149,34	110	1.125.525.817	39,29	12,08	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	201	7.113.238.783	40	40	944.075.000	10	80.863.000	10	241.751.575	10	315.075.518	10	444.690.800	40	1.082.380.893	100,00	114,65	80	1.082.380.893	39,80	15,22	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	108	637.597.235	21	21	129.278.000	6		69.111.050		0	5	103.257.100	11	172.368.150	52,38	133,33	32	172.368.150	29,36	27,03	Inspektoral Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	279	1.466.473.640	55	55	520.598.060	16	137.550.000	13	77.335.175	13		0	13	361.082.200	55	575.967.375	100,00	110,64	110	575.967.375	39,43	39,28	Inspektoral Daerah Provinsi
		6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	LAPORAN	107	13.702.729.693	21	21	840.796.160	6		248.369.205		402.443.000	5	22.173.400	11	672.985.605	52,38	80,04	32	672.985.605	29,91	4,91	Inspektoral Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	DOKUMEN	775	8.256.138.458	155	155	810.432.200	41	255.524.966	38	134.549.200	38	145.999.851	38	220.983.300	155	757.057.317	100,00	93,41	310	757.057.317	40,00	9,17	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.02	Penyenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Person	100	5.653.904.591	42,86	100	1.227.709.622	100	51.697.600	100	584.364.233	100	214.841.254	100	427.465.620	100	1.278.368.707	100,00	104,13	71,43	1.278.368.707	71,43	22,61	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.02.1.02.0001	Pengawasan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang diangani	LAPORAN	10	415.598.950	2	2	166.971.210			86.703.405		0		44.467.060		131.170.465		78,56	2	131.170.465	20,00	31,56	Inspektoral Daerah Provinsi		
		6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	95	5.238.305.641	19	19	1.060.738.412	7	51.697.600	4	497.660.828	4	214.841.254	4	382.998.560	19	1.147.198.242	100,00	108,15	38	1.147.198.242	40,00	21,90	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan	Person	80	14.441.916.279	34,56	48	2.026.107.888	38,35	107.775.620	35,35	516.254.645	35,35	305.658.622	35,35	836.848.594	35,35	1.766.537.481	73,48	87,19	34,955	1.766.537.481	88,24	12,25	Inspektoral Daerah Provinsi	
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang telah ditentukan	REKOMENDASI	45		7	7	141.511.160	4		12.841.580			1	102.965.000	5	115.806.580	71,43	81,84	12	115.806.580	26,67		Inspektoral Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	REKOMENDASI	45		0	7	141.511.160	4		12.841.580		0	1	102.965.000	5	115.806.580	71,43	81,84	12	115.806.580	26,67		Inspektoral Daerah Provinsi		
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Person	100	14.441.916.279	34,56	100	1.884.596.435	69,7	107.775.620	69,7	503.413.065	69,7	305.658.622	69,7	733.883.594	69,7	1.650.730.901	69,70	87,59	52,13	1.650.730.901	52,13	11,43	Inspektoral Daerah Provinsi	
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113				36.647.648.577		3.610.553.350		11.975.978.275		6.730.687.751		12.155.148.974	89,39	34.472.368.350	89,39	94,06		34.472.368.350	49,56	19,10		
Predikat Kinerja																		T	5T					SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan (2024) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										I	II	III	IV	I	II	III	IV										I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 12		16 = 15 / 6 x 100%		17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	215	3.078.032.227	33	43	234.620.000	13	23.100.000	10	137.367.057	10	0	10	41.000.000	43	201.467.057	100,00	85,87	76	201.467.057	35,35	6,58	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERANGKAT DAERAH	215	936.261.125	23	43	162.031.060	10			90.157.000		0	10	34.919.900	20	125.076.900	46,51	77,19	43	125.076.900	20,00	13,36	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEGIATAN	238	7.225.670.700	41	46	1.288.940.315	13	73.578.000	11	236.176.548	11	305.658.622	11	532.353.244	46	1.147.766.414	100,00	89,05	87	1.147.766.414	36,55	15,88	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PERANGKAT DAERAH	31	3.201.952.227	4	6	199.005.060		11.097.620	2	39.712.460	2	0	2	125.610.450	6	176.420.530	100,00	88,65	10	176.420.530	32,26	5,51	Inspektoral Daerah Provinsi								
2	Heningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat APP	B	0	118.912.143.043	81	81	29.394.987.840	81	2.854.954.007		9.634.897.632		5.267.730.006		9.283.915.360	81	27.041.177.003	100,00	91,99	162	27.041.177.003		22,85	Inspektoral Daerah Provinsi								
		XJXJ.01.1.01	Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang telah diumumkan	DOKUMEN	109	1.713.749.961	21	21	714.110.820	3	348.410.600	6	109.840.200	6		6	382.271.100	21	841.221.800	100,00	117,80	42	841.221.800	38,53	48,14	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	24	902.270.120	4	4	199.794.168	1	149.988.260	1	7.974.000	1	0	1	38.789.000	4	196.751.260	100,00	96,48	8	196.751.260	33,33	21,81	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	85	809.479.841	17	17	514.316.752	5	199.422.340	4	101.566.200	4	0	4	343.482.100	17	644.470.640	100,00	125,31	34	644.470.640	40,00	79,62	Inspektoral Daerah Provinsi								
		XJXJ.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	82.323.961.915	108,16	100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339	107	4.815.414.287	100	6.559.777.644	100	21.023.669.970	100,00	104,80	104,08	21.023.669.970	104,08	25,54	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	500	82.323.961.915	108,16	100	20.061.211.533	100	1.576.241.700	107	8.072.236.339	107	4.815.414.287	107	6.559.777.644	107	21.023.669.970	107,00	104,80	215,16	21.023.669.970	43,03	25,54	Inspektoral Daerah Provinsi								
		XJXJ.01.1.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	12.443.938.528	54,29	100	2.537.849.075		469.277.566	163,16	514.681.812	163,16		100	269.264.320	100	1.253.193.698	100,00	49,38	77,148	1.253.193.698	77,15	10,07	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	370	12.443.938.528	115,71	75	2.537.849.075		469.277.566	31	514.651.812	31	0	31	269.264.320	31	1.253.193.698	41,33	49,38	146,71	1.253.193.698	39,65	10,07	Inspektoral Daerah Provinsi								
		XJXJ.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100	9.681.169.892	35,59	100	1.756.114.298	93,75	268.490.472	93,75	562.135.610	93,75	208.476.109	93,75	856.330.888	93,75	1.695.435.139	93,75	96,54	64,47	1.695.435.139	64,47	17,81	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	162.447.207	12	12	32.449.318				10.388.540		0	3	21.425.240	3	31.813.780	25,00	96,04	15	31.813.780	25,00	19,58	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	60	451.757.905	12	12	99.995.100	3	8.900.000	3	33.080.030	3	0	3	56.932.530	12	98.912.560	100,00	96,92	24	98.912.560	40,00	21,90	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	144	883.995.995	28	28	151.020.000	7	2.569.000	7	8.569.000	7	0	7	47.884.580	28	59.022.580	100,00	39,08	56	59.022.580	38,89	6,68	Inspektoral Daerah Provinsi								
		6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	60	636.507.184	12	12	127.600.250	3			61.762.000		0	3	42.845.020	6	104.607.020	50,00	81,98	18	104.607.020	30,00	16,43	Inspektoral Daerah Provinsi								
Rata-rata capaian kinerja (%)						180.498.060.113				36.647.646.577		3.610.553.350		11.975.978.275		6.730.687.751		12.155.148.974	89,39	34.472.368.350	89,39	94,06		34.472.368.350	49,56	19,10									
Predikat Kinerja																		T	ST						SR	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*:																																			



Ir. H. Suryono, M.Si.
NIP. 195408141003003004

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten dengan aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan sesuai SOP	70%	36.327.793.143,00	72%	38.791.767.690,00	74%	38.246.520.193,07	76%	37.562.834.910,76	78%	38.091.593.477,90	80%	38.690.863.359,81
							7.031.723.465,00		8.045.349.172,00		8.181.025.348,58		9.226.930.476,33		8.318.190.781,08		8.371.800.011,78
			Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI	1) Kesiapan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	70%	6.624.402.083,00	72%	7.838.023.800,00	74%	8.067.084.187,00	76%	8.087.379.627,79	78%	8.178.353.424,06	80%	8.218.245.191,18
			Tingkat Mutu/Res SHIP	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	2.037.351.660,00	52 Lap	1.825.980.000,00	54 Lap	1.853.399.700,00	56 Lap	1.862.636.548,50	58 Lap	1.881.262.913,99	60 Lap	1.890.969.226,55
				2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	891.989.080,00	39 Lap	1.394.540.000,00	40 Lap	1.415.458.100,00	40 Lap	1.422.535.390,50	41 Lap	1.436.760.744,41	41 Lap	1.443.944.548,13
				3) Revisi Laporan Kinerja	3) Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	N/A	373.390.253,00	21 Lap	128.000.000,00	21 Lap	128.875.000,00	21 Lap	127.509.375,00	23 Lap	128.784.468,75	23 Lap	129.428.391,09

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				4) Revisi Laporan Keuangan	4) Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	N/A	563.181.160,00	55 Lap	287.500.000,00	55 Lap	291.812.500,00	55 Lap	293.271.562,50	57 Lap	296.204.278,13	57 Lap	297.685.299,52	279 Lap	1.468.473.640,14	
				5) Pengawasan Umum dan Teknik Kabupaten/Kota	5) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknik Kabupaten/Kota	N/A	1.038.888.160,00	21 Lap	2.886.400.000,00	21 Lap	2.726.696.000,00	21 Lap	2.740.329.480,00	22 Lap	2.767.732.774,80	22 Lap	2.781.671.438,67	107 Lap	13.702.729.693,47	
				6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	6) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	N/A	1.618.603.800,00	155 Dok	1.618.603.800,00	155 Dok	1.642.882.867,00	155 Dok	1.651.097.271,29	155 Dok	1.667.608.244,00	155 Dok	1.675.946.285,22	775 Dok	8.268.138.457,50	
				2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75%	1.107.321.372,00	100%	1.107.321.372,00	100%	1.123.931.192,58	100%	1.128.650.848,54	100%	1.140.846.387,03	100%	1.152.254.820,60	100%	5.653.904.590,73	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				1) Penanganan Penyelidikan Karugian Negara/ Daerah	1) Jumlah Laporan Penyelidikan Karugian Negara/ Daerah yang ditangani	N/A	81.395.360,00	2 Lap	81.395.360,00	2 Lap	82.616.290,40		83.029.371,85	2 Lap	83.859.665,57	2 Lap	84.698.262,23	10 Lap	415.598.950,05
				2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	N/A	1.025.926.012,00	19 Lap	1.025.926.012,00	19 Lap	1.041.314.902,18	19 Lap	1.046.521.476,69	19 Lap	1.056.986.691,46	19 Lap	1.067.556.558,37	95 Lap	5.238.305.640,70
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Tenaga kepalala pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Tingkat Mutu SPMP	Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistenasi	Persentase Peranglasi Daerah yang dilakukan pendampingan	33%	2.994.789.020,00	38%	3.396.920.000,00	43%	3.512.916.000,00	48%	3.530.479.575,00	53%	3.565.809.872,63	60%	3.601.467.871,35	60%	17.607.592.416,98
				1) Kegiatan	Jumlah	7	574.355.120,00	17	620.000.000,00	7	626.398.000,00	7	632.446.000,00	7	636.770.965,00	7	645.156.674,65	45	3.185.676.139,65
				1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	7	574.355.120,00	17	620.000.000,00	7	629.300.000,00	7	632.446.500,00	7	636.770.965,00	7	645.156.674,65	45	3.185.676.139,65

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	100%	2.420.433.900,00	100%	2.776.920.000,00	100%	2.883.615.000,00	100%	2.898.033.075,00	100%	2.927.038.907,63	100%	2.956.305.296,70
				1) Pendampingan dan Asistensi / Urusan Pemerintahan Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 PD	1.386.945.660,00	43 PD	526.000.000,00	43 PD	629.300.000,00	43 PD	632.446.500,00	43 PD	641.933.197,50	43 PD	648.352.529,48
				2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	43 PD	180.303.660,00	43 PD	183.000.000,00	43 PD	185.746.000,00	43 PD	186.673.725,00	43 PD	189.473.830,86	43 PD	191.368.569,18
				3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi / Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	3) Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi / Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	NA	683.985.620,00	48 Kag	1.416.000.000,00	48 Kag	1.439.270.000,00	48 Kag	1.446.488.350,00	50 Kag	1.453.698.681,75	50 Kag	1.468.235.686,57
				4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi / Penegakan Integritas	4) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi / Penegakan Integritas	2 PD	157.199.060,00	3 PD	648.920.000,00	4 PD	629.300.000,00	6 PD	632.446.500,00	8 PD	641.933.197,50	10 PD	648.352.529,48
																31 PD	3.201.862.226,98

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Predikat AKP	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Mewujudkan tata kelola Pemerintah dan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas AP/P	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Predikat AKP	B	25.601.278.657,00	B	26.349.502.518,00	B	25.552.578.845,48	B	24.805.424.859,43	B	25.206.585.824,18	BB	25.717.895.378,68	BB	127.631.888.423,78
			Indeks kepuasan audit atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan	20 Dok	243.098.980,00	21 Dok	333.800.000,00	21 Dok	338.008.800,00	21 Dok	340.803.042,80	23 Dok	345.712.088,14	23 Dok	382.626.328,80	109 Dok	1.711.748.886,54
			Persentase peningkatan AP/P yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	108.098.726,00	4 Dok	178.000.000,00	4 Dok	178.640.000,00	4 Dok	179.533.200,00	6 Dok	182.226.198,00	6 Dok	185.870.721,95	24 Dok	902.270.119,96

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ketercapaian SKPD	2) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	134.999.854,00	17 Dok	157.900.000,00	17 Dok	160.288.500,00	17 Dok	161.089.842,50	17 Dok	163.485.890,14	17 Dok	166.755.807,94	85 Dok	809.479.840,58	
				2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2) Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.839,00	100%	15.506.911.839,00	100%	15.817.050.075,78	100%	16.800.000.000,00	100%	17.000.000.000,00	100%	17.500.000.000,00	100%	82.323.961.914,78	
				1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	15.506.911.839,00	98 Orang	15.506.911.839,00	98 Orang	15.817.050.075,78	100 Orang	16.500.000.000,00	102 Orang	17.000.000.000,00	102 Orang	17.500.000.000,00	500 Orang	82.323.961.914,78	
				3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3) Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	3.499.984.632,00	100%	3.499.984.632,00	100%	3.499.984.632,00	100%	3.499.984.632,00	100%	3.499.984.632,00	100%	3.499.984.632,00	100%	17.499.923.180,00	
				1) Pengadaan Paketan Dinas Baserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Paketan Dinas Baserta Atribut Kelengkapannya	N/A	-	N/A	-	140 stel	112.000.000,00	140 stel	112.000.000,00	0	-	140 stel	112.000.000,00	420 stel	336.000.000,00	
				2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	3.499.984.632,00	70 orang	-	70 orang	3.087.984.632,00	75 orang	3.087.984.632,00	75 orang	3.199.984.632,00	80 orang	3.087.984.632,00	370 orang	12.443.938.528,00	
				3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	N/A	-	N/A	-	250 orang	150.000.000,00	250 orang	150.000.000,00	250 orang	150.000.000,00	300 orang	150.000.000,00	1050 orang	610.000.000,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
				4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA		NA		250 orang	150.000.000,00	250 orang	150.000.000,00	250 orang	150.000.000,00	300 orang	160.000.000,00	1050 orang	810.000.000,00
				4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	1.890.904.343,00	100%	2.146.064.343,00	100%	2.174.805.206,65	100%	2.187.877.732,66	100%	2.211.025.280,01	100%	2.234.423.293,66	100%	10.953.898.736,18
				1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisiek	NA	31.815.405,00	12 Paket	31.815.405,00	12 Paket	32.292.636,08	12 Paket	32.454.099,26	12 Paket	32.778.640,25	12 Paket	33.106.426,65	60 Paket	162.447.207,23

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	88.477.118,00	12 Paket	88.477.118,00	12 Paket	88.804.274,77	12 Paket	90.253.296,14	12 Paket	91.155.928,11	12 Paket	92.067.387,40	60 Paket	451.757.905,42
				3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	172.955.000,00	28 Paket	172.955.000,00	28 Paket	178.549.325,00	28 Paket	178.427.071,63	30 Paket	178.191.342,34	30 Paket	179.973.255,76	144 Paket	883.095.994,73
				4) Penyediaan barang perlengkapan dan penggantian dan yang Disediakan	4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian dan yang Disediakan	N/A	124.660.400,00	12 Paket	124.660.400,00	12 Paket	126.530.306,00	12 Paket	127.162.957,53	12 Paket	128.434.587,11	12 Paket	129.718.932,98	60 Paket	636.507.183,61
				5) Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan dan Peralengkapan Undangan	5) Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralengkapan Undangan yang Disediakan	N/A	25.927.920,00	12 Paket	25.927.920,00	12 Paket	26.316.638,80	12 Paket	26.448.422,98	12 Paket	26.712.907,22	12 Paket	26.680.036,30	80 Paket	132.386.125,31
				6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	1.447.128.400,00	500 Lap	1.452.228.400,00	500 Lap	1.474.011.626,00	500 Lap	1.481.381.885,13	500 Lap	1.496.195.703,98	500 Lap	1.511.157.661,02	2500 Lap	7.414.978.476,13

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Kondisi Kinerja Pada Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						N/A	N/A	1 Dak	250.000.000,00	1 Dak	250.000.000,00	1 Dak	253.750.000,00	1 Dak	257.558.250,00	1 Dak	261.419.593,75	5 Dak	1.272.725.843,75
				7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik pada SKPD	7) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik pada SKPD														
				5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	2.458.501.368,00	100%	2.230.000.000,00	100%	1.058.800.000,00	100%	388.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	4.230.000.000,00
				1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadatkan	1 Unit	29.230.000,00	6 Unit	1.000.000.000,00	6 Unit	750.000.000,00	0	-	0	-	0	-	12 Unit	1.750.000.000,00
				2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan	125 Unit	2.430.271.368,00	210 Unit	1.230.000.000,00	7 Unit	300.000.000,00	8 Unit	350.000.000,00	7 Unit	300.000.000,00	7 Unit	300.000.000,00	239 Unit	2.480.000.000,00
				6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6) Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	864.206.194,00	100%	864.206.204,00	100%	877.189.297,08	100%	881.555.143,58	100%	894.778.470,70	100%	912.674.040,11	100%	4.430.383.155,42
				1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	65.535.820,00	12 Lap	65.535.820,00	12 Lap	66.518.857,30	12 Lap	66.851.451,59	12 Lap	67.854.223,38	12 Lap	69.211.307,83	60 Lap	336.971.860,07
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2) r dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadatkan	N/A	266.786.170,00	12 Lap	266.786.180,00	12 Lap	270.786.957,70	12 Lap	272.140.892,49	12 Lap	276.223.005,68	12 Lap	281.747.465,99	12 Lap	1.367.683.502,05

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Kondisi Kinerja Pada Awal						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Target		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				3) Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan Kantor	3) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perawatan Kantor	N/A	18.120.000,00	12 Lap	18.120.000,00	12 Lap	18.391.800,00	12 Lap	18.483.759,00	12 Lap	18.761.015,39	12 Lap	19.136.235,69	60 Lap	92.892.810,08
				4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	N/A	513.795.204,00	12 Lap	513.795.204,00	12 Lap	521.471.682,06	12 Lap	524.079.040,47	12 Lap	531.940.226,08	12 Lap	542.579.030,60	60 Lap	2.633.836.183,21
				7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	1.136.812.806,00	100%	1.766.433.800,00	100%	1.794.962.134,00	100%	1.045.404.308,71	100%	955.085.373,34	100%	918.187.080,81	100%	6.482.074.496,86
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	303.260.000,00	7 Unit	153.710.000,00	10 Unit	156.015.650,00	13 Unit	156.795.726,25	13 Unit	159.147.664,17	13 Unit	162.330.617,46	13 Unit	787.999.658,86

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						46.053.154.843,32							46.581.915.410,94	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						46.053.154.843,32							46.581.915.410,94	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						46.053.154.843,32								
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP	-			B	28.510.744.791,99						-	28.911.905.757,20	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	-			23	940.603.042,50			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	945.712.088,14	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	479.533.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		482.226.198,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	461.069.842,50	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		463.485.890,14	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 Persen	18.540.319.933,00			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	19.040.319.933,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0001	Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	18.540.319.933,00	- Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		19.040.319.933,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase AP/IP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			100 Persen	3.499.984.632,00			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	3.499.984.632,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				140 Paket	112.000.000,00	- Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	26.448.422.99	- Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		26.712.907.22	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	1.481.381.865.13	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		1.496.195.703.98	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	253.750.000.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		257.556.250.00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	1.415.000.000.00			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	1.365.000.000.00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0062	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1.065.000.000.00	- Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		1.065.000.000.00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	350.000.000.00	- Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		300.000.000.00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	-			100 Persen	881.555.143.55			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	894.778.470.71	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	66.851.451.59	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		67.854.223.36	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	272.140.892.49	- Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		276.223.005.88	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			19 Laporan	2.046.521.476,69	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		2.056.986.691,46	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	-			53 Persen	3.530.479.575,00						-	3.565.809.872,63	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	-			7	632.446.500,00			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	638.770.965,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				7 Rekomend asi	632.446.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		638.770.965,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	-			100 Persen	2.698.033.075,00			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-	-	2.927.038.907,63	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				43 Perangkat Daerah	632.446.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		641.933.197,50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensisi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensisi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 Perangkat Daerah	186.673.725,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		189.473.830,88	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				46 Kegiatan	1.446.466.350,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		1.453.698.681,75	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensisi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensisi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 Perangkat Daerah	632.446.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah	-		641.933.197,50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		J U M L A H						46.053.154.843,32							46.581.915.410,94	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGKONG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Denda/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI																				
6		INSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							46.308.146.998,00	46.214.106.649,00	37.335.289.156,00	-7.994.040.849,00							42.236.966.104,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH							46.308.146.998,00	46.214.106.649,00	37.335.289.156,00	-7.994.040.849,00							42.236.966.104,00	
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKPP				-	B Predikat	35.836.882.602,00	36.856.163.814,00	32.185.556.487,00	-4.671.366.481,00							29.268.982.125,00	
6.01.01.1.01		Pembinaan, Pengawasan, dan Bimbingan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang secara dinamis				-	23 Dokumen	1.214.110.020,00	1.386.286.316,00	792.273.863,00	-421.832.367,00			-	-	-		362.036.709,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.01.0001		Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	196.764.189,00	374.640.064,00	167.293.509,00	-226.466,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.870.721,06	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	1.014.316.752,00	1.019.316.752,00	566.063.063,00	-453.247.689,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.755.697,94	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan giro dan pinjaman ASN				-	100 %	21.696.251.533,00	22.090.602.098,00	22.090.602.098,00				-	-	-		21.801.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/Bulan	102 Orang/Bulan	21.696.251.533,00	22.090.602.098,00	22.090.602.098,00		Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.660.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	100 %	2.236.362.735,00	3.087.640.717,00	2.006.440.962,00	-1.030.541.673,00			-	-	-		2.227.984.632,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	75 Orang	2.837.649.076,00	2.877.010.012,00	1.806.878.312,00	-1.027.072.763,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.067.994.632,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				260 Orang	260 Orang	301.633.580,00	410.839.628,00	146.864.576,00	-110.569.110,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja				-	100 %	2.121.394.298,00	2.192.319.209,00	1.066.726.969,00	-1.155.477.360,00			-	-	-		2.064.450.038,10	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Modal: Laba/Perantara Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Kurjutan modal Lantai/Perantara Bangunan Kantor yang Disalurkan				12 Paket	12 Paket	32.449.318,00	33.796.319,00	13.495.877,00	-18.953.441,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.100.426,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0002		Pengadaan Peralatan dan Peralengkapan Kerja																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kerja yang Disalurkan				12 Paket	12 Paket	90.065.100,00	90.395.100,00	37.565.400,00	-52.426.600,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.061.987,40	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0004		Pengadaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan				30 Paket	30 Paket	151.020.000,00	0,00	0,00	-151.020.000,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0005		Pengadaan Sarung Celanan dan Pengalasan																		
			Jumlah Paket Sarung Celanan dan Pengalasan yang Disalurkan				12 Paket	12 Paket	127.600.250,00	130.400.250,00	64.952.960,00	-43.247.300,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		129.716.839,96	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0006		Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disalurkan				12 Dokumen	12 Dokumen	26.062.837,00	26.062.837,00	1.621.489,00	-27.441.352,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.060.026,30	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0009		Pengembangan Rapor Kinerja dan Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Kinerja dan Kinerja SKPD				900 Laporan	900 Laporan	1.791.070.793,00	1.796.682.793,00	916.204.269,00	-879.872.560,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.511.157.461,02	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.01.1.06.0011		Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN LAPORAN TARGET REALISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU BENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JAWAB	
							TARGET 2025		PADAI INDIKATIF (Rp)				Berlambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY		TARGET	PADAI INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13				14	15		NASIONAL		DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pemerintahan Sektor Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000,00,00	12.461.000,00	12.461.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.419.580,75	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah (Pembelian)	Persentase pembelian barang milik daerah				-	100 %	4.232.807.612,00	4.532.193.700,00	2.324.108.700,00	-406.760.112,00				-	-	-	303.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kebutuhan Dasar Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disalurkan				0 Unit	0 Unit	3.347.174.000,00	3.363.863.000,00	2.078.572.000,00	-1.268.602.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disalurkan				7 Unit	7 Unit	895.723.512,00	1.476.569.700,00	1.245.567.700,00	-369.333.868,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		303.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Jalan	Persentase pemeliharaan jalan perantara yang				-	100 %	1.198.290.084,00	1.216.741.004,00	1.070.358.149,00	-126.337.625,00				-	-	-	912.674.040,11	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0001	Pemeliharaan Jalan Buntu Melayang																			
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan				12 Laporan	12 Laporan	101.875.500,00	101.976.500,00	94.327.260,00	-7.648.260,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		88.211.307,83	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0002	Pemeliharaan Jalan Perantara, Jalan Daye Aji dan Lintas																			
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Jalan Perantara, Jalan Daye Aji dan Lintas yang Disalurkan				12 Laporan	12 Laporan	272.545.000,00	424.000.000,00	364.204.720,00	-21.659.720,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.747.465,56	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0003	Pemeliharaan Jalan Perantara dan Perumahan Kantor																			
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perumahan Kantor yang Disalurkan				12 Laporan	12 Laporan	48.737.500,00	48.737.500,00	21.485.000,00	-29.252.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.136.735,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0004	Pemeliharaan Jalan Perantara Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Jalan Perantara yang Disalurkan				12 Laporan	12 Laporan	574.079.004,00	640.229.004,00	580.241.169,00	-112.796.899,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		542.578.010,60	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungutan Daerah	Persentase pemeliharaan bangun yang pemeliharaan				-	100 %	2.337.728.200,00	2.426.639.200,00	1.691.348.800,00	-155.280.000,00				-	-	-	615.167.080,61	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0001	Pemeliharaan Bangun Pemeliharaan, Bangun Pemeliharaan dan Pakai Kebutuhan Pemeliharaan Dinas atau Kebutuhan Dinas																			
			Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Dinas atau Kebutuhan Dinas yang Disalurkan yang Disalurkan yang Disalurkan				13 Unit	13 Unit	233.270.000,00	233.270.000,00	240.620.000,00	-42.010.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		162.790.617,40	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0002	Pemeliharaan Bangun Pemeliharaan, Bangun Pemeliharaan, Pakai dan Perumahan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disalurkan dan Disalurkan Pakai dan Perumahan				24 Unit	24 Unit	585.700.000,00	570.400.000,00	176.670.000,00	-399.100.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.467.505,94	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0006	Pemeliharaan Perumahan dan Mula Lainnya																			
			Jumlah Pemeliharaan dan Mula Lainnya yang Disalurkan				170 Unit	170 Unit	177.990.000,00	177.990.000,00	70.310.000,00	-107.680.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.586.579,41	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0006	Pemeliharaan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan dan Disalurkan				2 Unit	2 Unit	1.010.706.200,00	1.304.769.200,00	1.304.769.200,00	364.060.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELANGKARAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Pengawasan Sektor PKRT				-	78 %	7.386.422.465,00	7.198.176.468,00	3.833.813.470,00	-2.945.677.546,78				-	-	-	8.371.896.811,78		
	6.01.02.1.01	Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan internal				-	76 %	5.596.412.943,00	5.685.193.550,00	2.876.403.925,00	-2.722.009.815,00				3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.219.245.191,18	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah				58 Laporan	58 Laporan	1.593.664.000,00	1.721.065.600,00	1.000.304.300,00	-593.249.780,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan		1.690.660.225,55	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah				41 Laporan	41 Laporan	1.544.645.000,00	1.846.269.200,00	1.368.441.200,00	-476.200.800,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan		1.443.914.546,13	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.02.1.01.0003	Revisi Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja				22 Laporan	22 Laporan	126.574.000,00	58.275.000,00	18.662.060,00	-108.417.950,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan		1/2.426.261,06	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.02.1.01.0004	Revisi Laporan Kinerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEBIYAKATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI LAPANGAN REJUA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN LAPANGAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK KASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAH			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Belanja/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2025	APBD 2025					RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Renc. Laporan Keuangan				57 Laporan	57 Laporan	526.586.580,00	38.800.000,00	24.517.200,00	-496.086.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 2 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			297.686.296,52	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.02.1.01.0005		Pengawasan Umum dan Tercer. Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Tercer. Kabupaten Kota				22 Laporan	22 Laporan	940.785.580,00	1.014.192.050,00	246.119.275,00	-894.076.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			2.761.571.439,67	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.02.1.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemantauan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan APF	Jumlah Dukungan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemantauan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan APF				105 Dukumen	105 Dukumen	1.010.403.200,00	1.024.588.800,00	557.871.000,00	-451.781.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			1.675.946.295,22	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.02.1.02		Peningkatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu				-	100 %	1.727.000.622,00	1.460.684.810,00	757.510.445,00	-469.496.177,00		-	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			1.152.234.820,91	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.02.1.02.0001		Peningkatan Penyelidikan Keuangan Negara Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Keuangan Negara Daerah yang Ditinjau				2 Laporan	2 Laporan	106.571.210,00	172.131.210,00	83.730.000,00	-43.260.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			84.908.262,29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.02.1.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				18 Laporan	18 Laporan	1.540.028.412,00	1.321.253.400,00	673.607.450,00	-866.230.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			1.067.556.556,37	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5	5.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGANTARAN DAN ADAPTASI	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penyalangan				-	50 %	2.133.843.931,06	2.166.745.885,00	1.615.816.199,06	1.467.624.640,36							3.661.467.971,34	
5.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengukuran dan Fasilitas Pengukuran	Jumlah Kebijakan Teknik yang akan ditumai				-	4 Rekomendasi	245.247.490,00	284.162.950,00	132.687.075,00	-115.560.421,00		-	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			645.156.674,65	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.03.1.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengukuran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknik di Bidang Pengukuran yang Ditinjau				7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	245.247.490,00	284.162.950,00	132.687.075,00	-115.560.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			645.156.674,65	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan pendampingan dan asistensi				-	100 %	1.884.386.435,00	1.884.582.435,00	1.392.231.124,00	-501.665.311,00		-	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			2.865.106.226,71	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.03.1.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Usulan Peningkatan Daerah	Jumlah Peningkatan Daerah yang Ditinjau Peningkatan dan asistensi Usulan Peningkatan Daerah				43 Peningkatan Daerah	43 Peningkatan Daerah	234.670.000,00	234.670.000,00	106.750.900,00	-125.919.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			649.352.520,40	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.03.1.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Peningkatan Informasi Berbasis	Jumlah Peningkatan Daerah yang Ditinjau Peningkatan, Asistensi, Verifikasi dan Peningkatan Informasi Berbasis				43 Peningkatan Daerah	43 Peningkatan Daerah	162.031.060,00	162.031.060,00	111.654.450,00	-50.376.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			191.308.559,19	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.03.1.02.0003		Kontrolasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Peningkatan Kinerja	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Peningkatan Kinerja				30 Kegiatan	30 Kegiatan	1.288.940.315,00	1.288.640.315,00	1.024.384.674,00	-264.555.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			1.465.235.865,57	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
5.01.03.1.02.0004		Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Peningkatan Daerah yang Ditinjau Peningkatan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas				5 Peningkatan Daerah	5 Peningkatan Daerah	196.005.000,00	196.005.000,00	130.142.700,00	-65.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan 3 - Tata Kelola Pemerintahan			648.352.529,46	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		J U M L A H							45.305.198.998,00	46.214.106.449,00	37.315.288.198,00	-7.990.810.642,00							42.230.868.104,06	